

Dinamika Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program UPPO dalam Mewujudkan Keberlanjutan Produksi Pupuk Organik di Kelompok Tani Usaha Bersama Nagari Koto Tinggi

Pitri Andini*, Fitri Eriyanti

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat Program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dalam mewujudkan keberlanjutan produksi pupuk organik di Kelompok Tani Usaha Bersama (KTUB) Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Dharmasraya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan anggota kelompok dan pemangku kepentingan, observasi aktivitas produksi, serta studi dokumentasi terkait regulasi, laporan evaluasi, dan data statistik resmi. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles & Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berulang hingga pola temuan terbentuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan UPPO sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana, pendampingan teknis dan administratif, pemanfaatan potensi sumber daya lokal, serta keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Hambatan utama meliputi ketiadaan program lanjutan, lemahnya pengawasan dan monitoring, menurunnya partisipasi anggota, pergantian kepemimpinan, dan peran pihak swasta yang masih terbatas. Penelitian menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada bantuan awal, tetapi juga pada penguatan kelembagaan internal kelompok, koordinasi berkelanjutan antarinstansi, serta kemitraan strategis dengan pihak terkait. Simpulan penelitian menegaskan pentingnya peningkatan pendampingan teknis dan administratif, pemberdayaan anggota, serta keterlibatan pihak swasta untuk menjaga kemandirian kelompok dan keberlanjutan produksi pupuk organik. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk memperkuat strategi pemberdayaan kelompok tani dalam mendukung pertanian organik berkelanjutan di tingkat lokal.

Kata Kunci: UPPO, pupuk organik, keberlanjutan, kelompok tani Usaha Bersama, pertanian berkelanjutan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.322>

*Correspondence: Pitri Andini

Email: andinifitri2112@gmail.com

Received: 12-08-2025

Accepted: 22-08-2025

Published: 30-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract: This study aims to analyze the supporting and inhibiting factors of the Organic Fertilizer Processing Unit Program (UPPO) in achieving the sustainability of organic fertilizer production at the Kelompok Tani Usaha Bersama (KTUB) in Nagari Koto Tinggi, Dharmasraya Regency. A descriptive qualitative approach was employed, collecting data through in-depth interviews with group members and stakeholders, direct observation of production activities, and document studies, including regulations, evaluation reports, and official statistical data. Data were analyzed interactively using the Miles & Huberman model, involving data reduction, presentation, and iterative conclusion drawing until patterns emerged. The findings indicate that UPPO sustainability is strongly influenced by the availability of infrastructure, technical and administrative assistance, utilization of local resource potential, and active stakeholder involvement. Key challenges include the absence of follow-up programs, weak supervision and monitoring, declining member participation, leadership turnover, and limited private sector engagement. The study emphasizes that program success depends not only on initial support but also on strengthening internal group institutions, continuous inter-agency coordination, and strategic partnerships with relevant stakeholders. The conclusions highlight the importance of enhancing technical and administrative assistance, empowering group members, and increasing private sector participation to maintain group autonomy and ensure the sustainability of organic fertilizer production. This research provides recommendations for policymakers and stakeholders to strengthen farmer group empowerment strategies in supporting sustainable organic agriculture at the local level.

Keywords: UPPO, organic fertilizer, sustainability, Kelompok Tani Usaha Bersama, sustainable agriculture

Pendahuluan

Pertanian berkelanjutan menjadi agenda strategis nasional dalam menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan (Rhofita, 2022). Salah satu upaya yang dikembangkan adalah melalui Program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang dirancang Kementerian Pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Bantuan Pemerintah untuk Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), yang menegaskan dukungan negara dalam penyediaan sarana dan prasarana pengolahan pupuk organik bagi kelompok tani (Peraturan Menteri Pertanian, 2015). Pemanfaatan limbah peternakan dan perkebunan sebagai bahan baku pupuk organik tidak hanya menekan biaya produksi, tetapi juga meningkatkan kesuburan tanah secara jangka panjang. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa aplikasi pupuk organik cair berbasis urin sapi yang dipadukan dengan Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy secara signifikan, sehingga membuktikan peran penting pupuk organik dalam mendukung praktik pertanian berkelanjutan (Irawan et al., 2023). Selain itu, penggunaan pupuk organik juga dapat menurunkan dampak pencemaran lingkungan akibat pupuk kimia (Santoso, 2021).

Kabupaten Dharmasraya termasuk daerah penerima program UPPO sejak 2016 (Badan Pusat Statistik, 2023). Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 30.063 rumah tangga usaha pertanian di kabupaten ini, dengan 13.665 di antaranya merupakan petani kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan sarana produksi pertanian (Badan Pusat Statistik, 2023). Dari sisi implementasi, hanya tiga nagari di Dharmasraya yang menerima bantuan UPPO, yaitu Koto Tinggi, Koto Besar, dan Koto Baru (Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, 2023). Fakta ini menunjukkan pentingnya peran kelompok dalam memperkuat kapasitas kelembagaan petani di tingkat lokal. Dukungan kelembagaan terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pertanian berbasis masyarakat (Mudatsir, 2023).

Kelompok Tani Usaha Bersama (KTUB) yang berlokasi di Nagari Koto Tinggi menjadi bagian dari kelompok tani penerima bantuan UPPO th 2016 Baru (Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, 2023). Program ini awalnya diharapkan mampu menggerakkan produksi pupuk organik, namun data lapangan menunjukkan adanya penurunan signifikan. Produksi yang pada tahun 2016-2018 selalu naik mencapai 4 ton per tahun, akan tetapi sejak tahun 2018 hingga saat ini produksi menurun hingga menjadi 1,5 hingga 2 ton saja. Selain itu dari 20 anggota kelompok, hanya 5 orang yang masih aktif, sehingga kapasitas kelembagaan semakin melemah. Penurunan partisipasi anggota ini mencerminkan lemahnya integrasi fungsi pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan kelompok (Ruhimat, 2021). Untuk itu, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas anggota menjadi langkah penting agar kelompok mampu meningkatkan produksi dan keberlanjutan program di masa depan (Suherman, 2023).

Keberlanjutan program dipengaruhi oleh faktor pendukung maupun tantangan, termasuk kelembagaan, ekonomi, dan sosial (Nugroho et al., 2023). Faktor pendukung meliputi bantuan sarana prasarana dari pemerintah, pendampingan teknis oleh penyuluh, dukungan administratif nagari, potensi sumber daya lokal berupa kotoran sapi dan limbah perkebunan, serta keterlibatan pihak swasta meski masih terbatas. Sementara itu, tantangan yang dihadapi mencakup ketiadaan program lanjutan, lemahnya monitoring, rendahnya partisipasi anggota, pergantian kepemimpinan pemangku kepentingan, serta keterbatasan dukungan dari pihak swasta. Dukungan sarana dan pendampingan yang konsisten terbukti berpengaruh terhadap keberlanjutan kegiatan kelompok tani dan peningkatan kapasitas anggotanya (Mudatsir & Syarif, 2023). Sebaliknya, ketiadaan program lanjutan dan lemahnya pengawasan sering menjadi faktor utama kegagalan program pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian (Wahyudi et al., 2021).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan kelompok tani sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar pemangku kepentingan dan kapasitas internal kelompok (Ramadhina, 2024). Meski berbagai program pertanian berkelanjutan telah diterapkan di Indonesia, sebagian besar studi masih fokus pada aspek teknis produksi atau dukungan sarana-prasarana, sedangkan kajian yang menekankan integrasi peran pemangku kepentingan dan keterlibatan anggota dalam keberlanjutan kelompok masih terbatas (Prasetyo, 2022; Sulistyowati, 2023). Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan dengan menyoroti secara spesifik bagaimana interaksi antara pemerintah nagari, BPP kecamatan, dinas pertanian kabupaten, dan pihak swasta berperan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan serta keberlanjutan produksi pupuk organik di Kelompok Tani Usaha Bersama Nagari Koto Tinggi.

Dinamika faktor tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan produksi pupuk organik tidak hanya ditentukan oleh bantuan awal, tetapi juga memerlukan sinergi antar pemangku kepentingan, partisipasi aktif anggota, serta dukungan pasar. Kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis komunitas terbukti efektif dalam memperkuat kapasitas kelompok tani dan meningkatkan ketahanan pangan lokal (Hidayat et al., 2022). Di sisi lain tantangan seperti alih fungsi lahan dan degradasi sumber daya alam tetap menjadi hambatan signifikan dalam mencapai pertanian berkelanjutan (Saragih, 2017). Selain itu, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan dukungan lembaga juga mempengaruhi keberlanjutan program pertanian berbasis masyarakat (Mudatsir & Syarif, 2023). Penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam faktor pendukung dan tantangan yang dihadapi Kelompok Tani Usaha Bersama di Nagari Koto Tinggi agar diperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas program UPPO dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan di tingkat lokal.

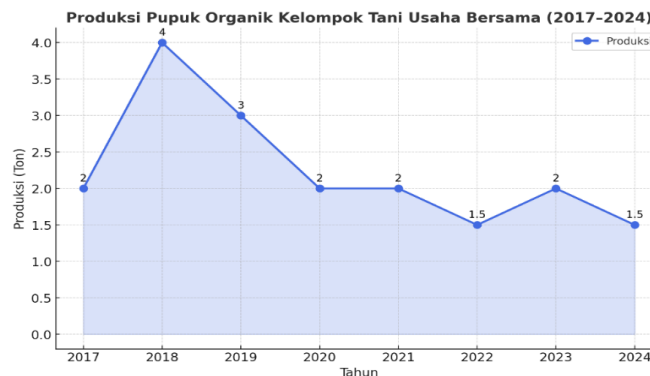
Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam dinamika faktor pendukung dan tantangan dalam Program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) pada Kelompok Tani Usaha Bersama (KTUB) di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Dharmasraya. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif karena KTUB merupakan salah satu dari tiga kelompok penerima bantuan UPPO di Dharmasraya yang menghadapi penurunan produksi signifikan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan (Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, BPP Koto Besar, Pemerintah Nagari Koto Tinggi, pihak swasta dan anggota KTUB) serta observasi langsung pada aktivitas produksi pupuk organik. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen regulasi, pedoman program, laporan evaluasi, dan publikasi statistik resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles & Huberman (1994:16), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang hingga pola temuan terbentuk. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta member checking kepada informan. Penelitian ini tidak melibatkan intervensi pada manusia maupun hewan sehingga tidak memerlukan persetujuan etik formal. Seluruh wawancara dilakukan atas persetujuan informan, dengan menjaga kerahasiaan identitas responden non-publik. Data penelitian, termasuk transkrip wawancara teranonimkan, catatan observasi, dan hasil analisis, tersedia melalui penulis korespondensi tanpa pembatasan akses.

Hasil dan Pembahasan

Produksi pupuk organik di Kelompok Tani Usaha Bersama (KTUB) Nagari Koto Tinggi mengalami penurunan cukup besar sejak pelaksanaan program UPPO beberapa tahun terakhir. Data mengenai perkembangan produksi yang diperoleh dari sekretaris KTUB tersaji pada grafik berikut :



Gambar 1. Grafik Produksi pupuk organik KTUB tahun 2017-2024

Faktor Pendukung

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan produksi pupuk organik di Nagari Koto Tinggi dapat diuraikan sebagaimana ditampilkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1. Faktor Pendukung Program UPPO di Nagari Koto Tinggi

No	Faktor	Deskripsi
1.	Bantuan sarana dan prasarana dari program UPPO	Rumah kompos, mesin pengolah Pupuk, Becak Motor, Kandang Sapi, Kendaraan Roda Tiga dan 11 ekor sapi
2.	Pendampingan teknis dan manajerial	a. Pelatihan Pembuatan pupuk oleh BPP b. Pendampingan pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh BPP c. Pendampingan Teknis oleh Dinas Pertanian
3.	Dukungan administratif dan legalitas	a. SK kelompok, Surat pengantar dan dukungan administrasi yang dibutuhkan (Pemerintah Nagari) b. Surat keterangan kelas kelompok (Balai Penyuluh Pertanian) c. Surat Rekomendasi (rekomendasi penerima bantuan, rekomendasi pencairan dana dan administrasi mengenai bantuan uppo lainnya (Dinas Pertanian)
4.	Potensi sumber daya alam local	Limbah kotoran sapi dan perkebunan sawit tersedia melimpah.

a. Bantuan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor krusial dalam pemberdayaan kelompok tani karena menentukan keberlanjutan produksi pupuk organik. Bantuan pemerintah berupa rumah kompos, kandang ternak, dan mesin pengolah pupuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen produksi, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi dan dukungan negara terhadap kemandirian petani. Efektivitas fasilitas tersebut sangat dipengaruhi oleh distribusi yang merata, manajemen pasca-distribusi, serta penguatan kelembagaan agar pemanfaatannya optimal. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi pertanian modern dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing kelompok tani, tetapi tanpa perawatan dan supervisi yang baik, banyak fasilitas berisiko mangkrak (Nugroho, 2014). Dengan demikian, keberlanjutan program UPPO sangat bergantung pada pengelolaan sarana yang konsisten dan terintegrasi dengan strategi kelembagaan.

b. Pendampingan Teknis dan Manajerial

Pendampingan teknis dan manajerial merupakan aspek penting dalam pemberdayaan kelompok tani karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana, tetapi juga oleh kemampuan petani dalam mengelola dan

mengoperasikan bantuan yang diterima. Penyuluhan dan bimbingan terbukti meningkatkan keterampilan petani dalam pengolahan pupuk organik, memperkuat kelembagaan, serta mendorong partisipasi anggota melalui motivasi dan monitoring berkelanjutan. Peran Balai Penyuluh Pertanian menjadi krusial dalam memastikan transfer pengetahuan, pemanfaatan sumber daya lokal, penguatan administrasi kelompok, hingga pencegahan penyalahgunaan bantuan. Dengan strategi pendampingan yang terarah dan berkesinambungan, kelompok tani memiliki peluang lebih besar untuk menjaga konsistensi produksi dan kemandirian usaha, sehingga keberlanjutan program UPPO dapat terjamin dalam kerangka pembangunan pertanian berkelanjutan (Rahmawati & Kurniawan, 2022).

c. Dukungan administrative dan legalitas

Legalitas usaha dan dukungan administratif merupakan aspek penting yang menopang keberlanjutan Kelompok Tani Usaha Bersama dalam memproduksi pupuk organik, karena tanpa dokumen resmi produk hanya dipasarkan secara lokal dan sulit menembus pasar modern. (Yuzianah dkk., 2024) menegaskan bahwa hambatan utama kelompok tani di berbagai daerah adalah minimnya kemampuan mengurus legalitas, sehingga produk mereka tidak mampu bersaing di pasar lebih luas. Keberadaan dokumen seperti SK kelompok, sertifikasi teknis, izin edar, maupun pencatatan administrasi internal yang rapi terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat posisi kelompok dalam rantai distribusi, serta melindungi dari potensi sengketa aset maupun masalah hukum. Peran pemerintah daerah, dinas pertanian, BPP, dan nagari dalam memfasilitasi legalitas menjadi faktor kunci agar kelompok dapat berkembang menjadi lembaga yang mandiri dan berdaya saing, sekaligus memastikan keberlanjutan produksi pupuk organik dalam kerangka pembangunan pertanian berkelanjutan.

d. Potensi Sumber Daya Alam Lokal

Penelitian Ningsih (2022) menemukan bahwa inovasi pemanfaatan kotoran sapi dalam bentuk bokhasi mampu meningkatkan nilai jual pupuk organik hingga 40% dibandingkan kompos biasa. Temuan ini relevan dengan konteks Kelompok Tani Usaha Bersama di Nagari Koto Tinggi, di mana ketersediaan kotoran sapi yang melimpah seharusnya dapat menjadi modal strategis dalam keberlanjutan produksi pupuk organik. Persamaannya, sama-sama menekankan pentingnya pengolahan limbah ternak sebagai sumber daya lokal yang bernilai ekonomis. Perbedaannya, jika penelitian Ningsih menunjukkan keberhasilan peningkatan nilai jual melalui inovasi produk, penelitian ini justru memperlihatkan bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya

dimanfaatkan karena lemahnya manajemen kelompok dan minimnya diversifikasi produk.

Faktor Penghambat (Tantangan)

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat keberlanjutan produksi pupuk organik di Nagari Koto Tinggi dapat diuraikan sebagaimana ditampilkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2. Faktor Penghambat keberlanjutan Program UPPO di Nagari Koto Tinggi

No	Faktor	Deskripsi
1.	Ketiadaan program lanjutan	Tidak ada program baru setelah UPPO untuk menunjang keberlanjutan produksi pupuk bagi kelompok yang mendapatkan UPPO.
2.	Lemahnya pengawasan dan monitoring	Monitoring pasca bantuan tidak konsisten karena keterbatasan jumlah penyuluh dan jarak yang jauh dari dinas pertanian
3.	Menurunnya partisipasi anggota	Hanya 5 dari 20 anggota yang aktif, menyebabkan penurunan kapasitas produksi. Ditambah lagi ketua tidak berperan aktif, kelompok dipegang kendali oleh sekretaris kelompok
4.	Pergantian kepemimpinan	Perubahan pejabat di nagari, BPP, dan dinas menyebabkan berkurangnya dukungan.
5.	Terbatasnya peran pihak swasta	Keterlibatan sebatas transaksi jual beli tanpa dukungan teknis atau pemasaran.

a. Ketidadaan Program Lanjutan dari Pemangku Kepentingan

Keberlanjutan produksi pupuk organik di Nagari Koto Tinggi masih menghadapi keterbatasan dukungan dari para pemangku kepentingan. Setelah program UPPO dilaksanakan, tidak ada inisiatif atau program baru yang dirancang untuk memperkuat kesinambungan produksi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya komitmen jangka panjang dalam menjaga keberlangsungan program pemberdayaan kelompok tani, di mana peran pemangku kepentingan hanya sebatas pada tahap awal. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rahmawati,2022) yang menegaskan bahwa minimnya inovasi kebijakan dan tindak lanjut dari pihak terkait menjadi salah satu faktor penghambat utama keberlanjutan program berbasis kelompok tani.

b. Lemahnya Pengawasan dan Monitoring

Lemahnya pengawasan dan monitoring menjadi hambatan serius bagi keberlanjutan produksi pupuk organik di Kelompok Tani Usaha Bersama Nagari Koto Tinggi. Monitoring yang seharusnya berfungsi memastikan sarana dan prasarana dimanfaatkan sesuai tujuan program lebih banyak dijalankan sebatas formalitas, terbatas pada tahap awal pembangunan dan penyaluran, tanpa keberlanjutan di fase

operasional. Kondisi ini menyebabkan berbagai persoalan teknis maupun kelembagaan kelompok tidak teridentifikasi sejak dini, sehingga penurunan partisipasi anggota dan pengelolaan sarana yang terbengkalai berkembang tanpa solusi yang jelas. Temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya monitoring pasca bantuan berdampak langsung pada penurunan produksi pupuk organik lebih dari 50% dibanding awal program, di mana kelompok kehilangan arahan untuk memperbaiki strategi produksi. Situasi ini sejalan dengan penelitian Nikolas dan Rusae (2023) yang menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi berkesinambungan merupakan faktor kunci dalam menjaga kesinambungan produksi pupuk organik.

c. Menurunnya Partisipasi Anggota

Menurunnya partisipasi anggota menjadi hambatan utama dalam keberlanjutan program UPPO di Nagari Koto Tinggi. Dari 20 anggota yang terdaftar, hanya lima orang yang masih aktif hingga 2025, sementara ketua kelompok tidak lagi menjalankan perannya sehingga kepemimpinan melemah dan motivasi anggota lain ikut menurun. Kondisi ini diperburuk oleh metode penyuluhan yang monoton serta pendampingan dari BPP Kecamatan Koto Besar yang lebih bersifat formalitas karena keterbatasan jumlah penyuluh. Akibatnya, kelembagaan kelompok tidak berjalan efektif, forum evaluasi tidak berfungsi, dan pemasaran pupuk organik tidak berkembang, sehingga keberlanjutan produksi sulit dicapai. Fenomena rendahnya partisipasi ini juga ditemukan dalam penelitian Hardiyani dkk. (2021), yang menegaskan bahwa minimnya keterlibatan anggota bukan hanya persoalan motivasi individu, tetapi juga cerminan lemahnya struktur kelembagaan kelompok.

d. Pergantian Kepemimpinan

Menurut Nurdin dkk. (2025), pergantian kepemimpinan di tingkat pemangku kepentingan menjadi hambatan utama bagi keberlanjutan program UPPO di Nagari Koto Tinggi, karena program jangka panjang sering terhenti atau tidak konsisten akibat pejabat baru yang fokus pada administrasi kontrak daripada penguatan teknis bagi kelompok tani. Pergantian koordinator BPP dan wali nagari menyebabkan dukungan lebih bersifat formalitas, sementara ketua kelompok internal tidak aktif sehingga kepemimpinan internal melemah, membuat kelompok kesulitan menjaga konsistensi produksi pupuk organik. Ketiadaan mekanisme transisi atau kaderisasi internal menghambat fungsi pemangku kepentingan sebagai fasilitator, koordinator, implementor, dan akselerator, sehingga hubungan dengan kelompok dan koordinasi antarinstansi tidak optimal. Dampak nyata terlihat pada menurunnya motivasi anggota, lemahnya efisiensi sumber daya, dan penurunan produktivitas pupuk organik,

menegaskan bahwa kesinambungan program sangat tergantung pada stabilitas kepemimpinan dan tindak lanjut rutin.

e. Terbatasnya Peran Pihak Swasta

Peran pihak swasta dalam pembangunan pertanian sering dianggap penting untuk memperkuat rantai nilai, membuka akses pasar, dan mendorong keberlanjutan usaha petani. Temuan di Kelompok Tani Usaha Bersama menunjukkan bahwa keterlibatan swasta masih terbatas, hanya berfungsi sebagai pembeli pupuk organik tanpa memberikan pendampingan, pelatihan, atau dukungan teknis. Pola kemitraan ini bersifat transaksional dan belum menyentuh aspek pemberdayaan, sehingga peluang pasar tetap terbatas dan strategi promosi maupun branding produk tidak berkembang. Kondisi ini sejalan dengan temuan Ardiansyah & Susilowati (2022), yang menekankan bahwa kemitraan sejati harus melibatkan kontribusi pihak swasta dalam penguatan kapasitas petani. Minimnya dukungan jangka panjang dari swasta memperlihatkan lemahnya koordinasi dengan pemangku kepentingan lain, sehingga keberlanjutan produksi pupuk organik sulit terjamin dan motivasi kelompok menurun.

Analisis

Keberlanjutan produksi pupuk organik di Nagari Koto Tinggi bergantung pada keterpaduan peran pemangku kepentingan. Bantuan sarana dan prasarana memang memberi fondasi awal, namun keberlanjutan tidak akan terjamin tanpa dukungan kelembagaan yang konsisten. Anggreny dkk. (2025) menegaskan bahwa penguatan jaringan komunikasi dan dukungan institusi antar pemangku kepentingan berperan krusial dalam membangun kelembagaan ekonomi petani yang tangguh. Kondisi ini sejalan dengan temuan di Nagari Koto Tinggi, di mana lemahnya koordinasi antar pihak menyebabkan stagnasi kelompok ketika dukungan eksternal tidak lagi hadir.

Peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Dinas Pertanian dalam pendampingan teknis serta administratif telah mendorong kelompok menjaga standar produksi. Akan tetapi, lemahnya pengawasan dan monitoring pasca bantuan menimbulkan kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Nugroho (2014) menekankan bahwa pemangku kepentingan seharusnya berfungsi sebagai fasilitator dan akselerator, bukan hanya sekadar penyalur kebijakan. Kondisi ini menunjukkan perlunya koordinasi lebih kuat di tingkat lokal agar kebijakan tidak berhenti pada distribusi bantuan.

Menurunnya partisipasi anggota kelompok juga menjadi hambatan besar yang membuat beban kerja dan administrasi tidak merata. Kondisi ini menunjukkan rendahnya pemberdayaan internal dan lemahnya solidaritas kolektif. Afriansyah dkk. (2023) menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat bergantung pada keterlibatan

aktif seluruh anggota, bukan sekadar peran sebagian kecil individu. Temuan serupa ditunjukkan oleh Damayanti dkk. (2024) melalui kegiatan penyuluhan pemanfaatan pupuk organik lokal di Lampung, di mana partisipasi aktif masyarakat terbukti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta memperkuat keberlanjutan praktik pertanian organik. Tanpa revitalisasi partisipasi, program berisiko kehilangan basis sosial yang menopangnya.

Kendala utama keberlanjutan UPPO tidak hanya terkait sarana, administrasi, atau kebijakan, tetapi juga terletak pada lemahnya integrasi fungsi pemangku kepentingan dan minimnya mekanisme internal kelompok. Keterbatasan ini mengurangi kapasitas kelompok untuk beradaptasi terhadap perubahan, termasuk pergantian kepemimpinan dan fluktuasi partisipasi anggota. Strategi berkelanjutan sebaiknya menekankan outcome berupa kemandirian kelembagaan dan kapasitas anggota, bukan hanya distribusi bantuan fisik. Penguatan jejaring antar pihak, monitoring berkesinambungan, dan kemitraan pasar yang strategis dapat meningkatkan daya tahan kelompok dan memastikan praktik pertanian organik tetap berjalan meski dukungan eksternal berkurang.

Secara garis besar dinamika faktor pendukung dan penghambat memperlihatkan bahwa UPPO belum sepenuhnya berjalan sesuai orientasi pertanian berkelanjutan. Program masih lebih menekankan output berupa bantuan dibanding outcome berupa kemandirian kelompok. Dukungan pemerintah nagari, BPP, dinas, dan pihak swasta perlu diperkuat dalam bentuk koordinasi berkelanjutan, pengawasan intensif, serta strategi kemitraan pasar. Pemberdayaan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai bila masyarakat lokal terlibat aktif dan kelembagaan didukung oleh sinergi berbagai pihak.

Simpulan

Keberlanjutan Program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Kelompok Tani Usaha Bersama Nagari Koto Tinggi sangat bergantung pada sinergi antara pemangku kepentingan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta potensi sumber daya lokal. Keterbatasan dalam kelanjutan program, lemahnya pengawasan, menurunnya partisipasi anggota, pergantian kepemimpinan, dan peran pihak swasta yang terbatas menjadi tantangan utama dalam mempertahankan produksi secara konsisten. Upaya untuk meningkatkan kemandirian kelembagaan, penguatan kapasitas anggota, koordinasi berkesinambungan antarinstansi, serta kemitraan strategis dengan pihak terkait menjadi kunci untuk memastikan praktik pertanian organik tetap berjalan dan mendukung pertanian berkelanjutan di tingkat lokal.

Secara praktis, pemerintah dan pemangku kepentingan disarankan untuk meningkatkan pendampingan teknis dan administratif, menjamin kontinuitas program, serta memperluas keterlibatan pihak swasta dalam rantai produksi pupuk organik, disertai dengan pelatihan dan pemberdayaan anggota kelompok tani untuk menjaga kemandirian

kelembagaan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara komparatif pada beberapa kelompok tani di wilayah berbeda guna memperoleh generalisasi temuan yang lebih luas, sekaligus mengintegrasikan data kuantitatif produksi secara lebih lengkap untuk menganalisis hubungan langsung antara faktor pendukung, hambatan, dan hasil produksi pupuk organik, sehingga dapat memberikan dasar rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan pertanian organik berkelanjutan.

Referensi

- Afriansyah, D., Nugraha, A., & Putri, S. (2023). Pemberdayaan masyarakat dalam pertanian organik: Studi partisipasi anggota kelompok tani di Jawa Tengah. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Anggreny, R., Santoso, B., & Pratama, D. (2025). Penguatan jaringan komunikasi dan institusi pertanian berkelanjutan: Pendekatan kelembagaan ekonomi petani. Jakarta: Pustaka Pertanian Indonesia.
- Ardiansyah, R., & Susilowati, E. (2022). Kemitraan pihak swasta dalam pemberdayaan kelompok tani: Analisis rantai nilai dan akses pasar. Bandung: CV Agro Media.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik pertanian Kabupaten Dharmasraya 2023. Dharmasraya: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya.
- Damayanti, N., Lestari, P., & Hartono, A. (2024). Penyuluhan pemanfaatan pupuk organik lokal dan partisipasi masyarakat: Studi di Lampung. Lampung: Universitas Lampung Press.
- Hardiyani, T., Wulandari, R., & Kurniawan, F. (2021). Struktur kelembagaan kelompok tani dan partisipasi anggota: Faktor penentu keberlanjutan produksi. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hidayat, R., Suryanto, S., & Putra, F. (2022). Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan urban farming di Surabaya. *Presidensial: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(3), 1–16. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Presidensial/article/download/936/937/4577>
- Irawan, B., Prasetyo, H., & Ramadhan, M. (2023). Efektivitas pupuk organik cair berbasis urin sapi dengan PGPR pada tanaman pakcoy. *Jurnal Agritech*, 18(2), 101–112.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Mudatsir, Rasdiana, dan Asriyanti Syarif. 2023. "Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto." *Jurnal Galung Tropika* 12 (2): 262–272. <https://doi.org/10.31850/jgt.v12i2.1112>
- Ningsih, A. (2022). Inovasi pemanfaatan kotoran sapi dalam produksi bokhasi untuk meningkatkan nilai jual pupuk organik. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 15(1), 45–53.
- Nugroho, A., Suryanto, S., & Putra, F. (2023). Revitalisasi pertanian berkelanjutan: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Pertanian Berkelanjutan*, 15(2), 45–58. <https://e-journal.my.id/perbal/article/download/5585/4033>
- Nugroho, S. (2014). Pemanfaatan teknologi pertanian modern dalam pemberdayaan kelompok tani. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nurdin, F., Ramli, H., & Sari, Y. (2025). Pengaruh pergantian kepemimpinan terhadap kesinambungan program pertanian organik. *Jurnal Kebijakan Publik Pertanian*, 12(1), 23–34.
- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. (2023). *10 program unggulan Disperta Dharmasraya terealisasi dengan baik*. <https://dharmasrayakab.go.id/berita/baca/10-program-unggulan-disperta-dharmasraya-teralisasi-dengan-baik>
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Bantuan Pemerintah untuk Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO). Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Prasetyo, A. (2022). Efektivitas pelatihan teknologi pertanian dalam meningkatkan kapasitas kelompok tani. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 6(2), 55–66.
- Rahmawati, D. (2022). Inovasi kebijakan dan tindak lanjut dalam pemberdayaan kelompok tani: Analisis program jangka panjang. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Rahmawati, D., & Kurniawan, F. (2022). Pendampingan teknis dan manajerial dalam keberlanjutan kelompok tani. *Jurnal Pemberdayaan Petani*, 7(3), 56–68.
- Ramadhina, R. P. (2024). *Peranan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan pelaku IKM di Kabupaten Pesisir Selatan* (Skripsi, Universitas Negeri Padang).

- Rhofita, Erry Ika Rhofita. "Optimalisasi sumber daya pertanian Indonesia untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi nasional." *Jurnal Ketahanan Nasional* 28.1 (2022): 82.
- Ruhimat, I. S. (2021). Strategi penguatan kelembagaan kelompok tani dalam usahatani agroforestry. *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan*, 18(1), 27–43.
- Santoso, H. (2021). Peran pupuk organik dalam meningkatkan kualitas tanah dan keberlanjutan pertanian. *Jurnal Agrikultura Indonesia*, 10(1), 33–44.
- Saragih, J. P. (2017). Tantangan kebijakan pengembangan sektor pertanian di Indonesia. *Kajian Politik*, 9(2), 45–58. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/770/515>
- Suherman, E. (2023). Pengembangan kelembagaan, partisipasi, dan kemandirian kelompok tani dalam mendukung program integrasi sapi sawit. *Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian*, 4(2), 154–165.
- Sulistiyowati, C. A. (2023). Potensi pertanian berbasis dukungan komunitas sebagai alternatif ketahanan pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(2), 241–261
- Wahyudi, T., Rinaldi, A., & Sari, D. P. (2021). Analisis faktor penghambat program pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 9(2), 145–156. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jagbi>
- Yuzianah, R., Hartono, A., & Putri, N. (2024). Dukungan administratif dan legalitas kelompok tani dalam pemasaran pupuk organik. *Jurnal Ekonomi Pertanian*, 10(2), 77–88.